



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**  
**KANTOR WILAYAH BANTEN**



# **LKjIP TA. 2022**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**KELAS IIA TANGERANG**  
**TAHUN 2022**



# KATA PENGANTAR

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu program pemerintah untuk menghadapi pesatnya kemajuan teknologi informasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut dilakukan melalui pembaharuan Birokrasi secara digital dengan memangkas alur/proses birokrasi sebagai langkah dalam percepatan dan kemudahan layanan kepada publik.

Dalam mewujudkan Birokrasi Digital tentu tidaklah sederhana, dibutuhkan Transformasi Kinerja melalui Layanan dan Pengelolaan berbasis teknologi informasi, Pembangunan dan Pengembangan SDM Unggul yang mampu menjawab isu-isu strategis, Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan dan Akuntabilitas Kinerja yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang kemudian direpresentasikan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 khususnya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tangerang mengacu kepada pengukuran hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hasil terhadap capaian kinerja tersebut, diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tangerang dimasa mendatang



Tangerang, 13 Januari 2023  
Kepala,  
Lapas Kelas IIA Tangerang



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Yekti Apriyanti  
NIP 197704281999022001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
Maksud dan Tujuan.....	3
Dasar Hukum .....	3
Pengertian Istilah .....	4
Gambaran Umum Organisasi.....	5
Potensi Permasalahan Organisasi .....	9
Sistematika Penyajian Laporan.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
Rencana Strategis.....	12
Sasaran Strategis .....	14
Perjanjian Kinerja .....	17
Program dan Anggaran .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
Capaian Kinerja Lapas Kelas IIA Tangerang .....	21
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
Kesimpulan .....	41
Rencana Tindak Lanjut .....	42

## LAMPIRAN

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang merupakan instansi yang berada dalam lingkup Kanwil Banten Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Satker, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang mengemban tugas dibidang hukum dan HAM yang harus mewujudkan hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

## VISI

***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***

## Misi

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.**
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.**
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.**
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.**
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.**
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.**
- 7. Sebagai bagian dari Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden**
- 8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan**

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah :

***Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Misi Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 8 yang kemudian diterjemahkan kedalam 7 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

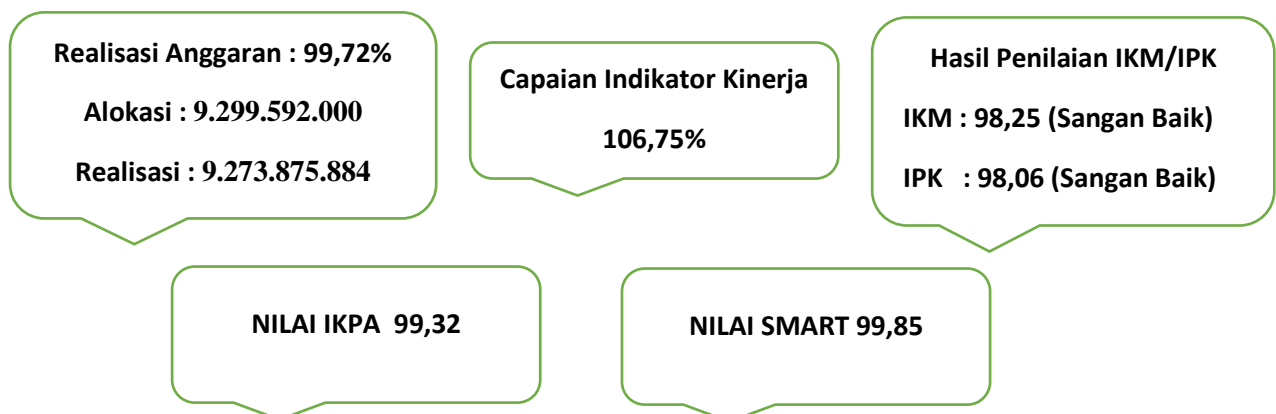
Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan kunjungan.
3. Memberikan Hak Wargabinaan dalam Beragama
4. Melaksanakan Perawatan Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan WBP
5. Mewujudkan Lapas Produktif
6. Mewujudkan Pelayanan Berbasis HAM

Selama periode tahun 2022, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang. Dari total 24 target indikator kinerja capaian seluruh indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang pada tahun 2022 yaitu sebesar **106,75%**. Disisi lain, pada tahun 2022 pagu anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang untuk 2 Program adalah sebesar Rp. **9.299.592.000,-** dan telah berhasil direalisasikan pada periode tahun 2022 sebesar Rp. **9.273.875.884,-** atau capaian atas realisasi anggaran sebesar **99,72%**. Kualitas penyerapan anggaran tersebut mempertimbangkan ketercapaian output kegiatan dan outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## Capaian Kinerja Lapas Kelas IIA Tangerang



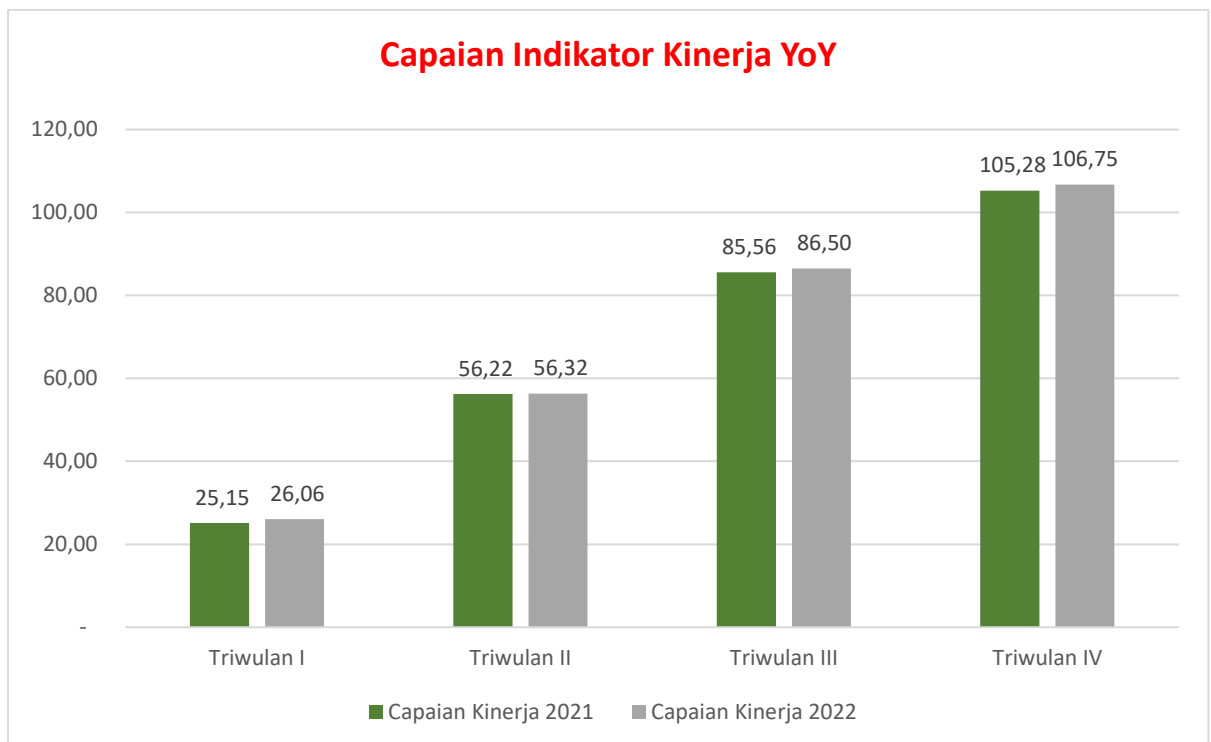
Keberhasilan capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tangerang pada tahun 2022 ini juga dibuktikan dengan prestasi yang telah diraih selama tahun 2022 diantaranya:

1. Piagam Penghargaan Sebagai Terbaik 2 dalam Pengelolaan Arsip Tahun 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum HAM Banten



2. Piagam Penghargaan Sebagai Terbaik 3 dalam Pelaksanaan Kinerja Anggaran Tahun 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum HAM Banten





Capaian kinerja Lapas Kelas IIA Tangerang pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, terlihat dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2022 yang meningkat sebesar 1,47% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan dalam sisi kinerja anggaran, pada tahun 2022 realisasi anggaran Lapas Kelas IIA Tangerang mengalami penurunan sebesar -0,06% dibandingkan tahun sebelumnya.



Dalam rangka Meningkatkan dan memberikan Pelayanan Prima, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang membuat inovasi pelayanan dengan inovasi terbaru pada pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Berikut Inovasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang, yaitu

- GEROBAK SEHAT Lapas Tanggo

Hasil pencapaian kinerja dan Inovasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang harus mampu dipertahankan dan ditingkatkan serta dilakukan evaluasi kinerja secara berkesinambungan melalui berbagai perbaikan, kreasi dan inovasi serta monitoring berkala atas pencapaian kinerja sehingga kedepan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang dapat menghasilkan prestasi yang bermanfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM RI serta masyarakat luas.



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

Informasi tentang kondisi gambaran umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tangerang, yang berisikan latar belakang, profil, tugas dan kewenangan, potensi permasalahan dan sistematika penyajian pelaporan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tangerang.

# Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang merupakan Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang berusaha mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM R.I. yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Keperibadian dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi.
2. Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban.
3. Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Rehabilitasi Narkotika.
4. Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran strategis sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka disusun Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang selama tahun 2022 dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

## Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran strategis Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Satker serta dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama periode satu tahun sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang.

## Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

## Pengertian Istilah

Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Untuk memahami Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang secara keseluruhan, terdapat komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan diantaranya :

1. Rencana Strategis adalah pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan HAM untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (RPJMN 2020 – 2024).
2. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja yang termuat Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
3. Sasaran (target) adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan.
4. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga.
5. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (*Input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*).

# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

Informasi tentang perencanaan kinerja Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tangerang berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan Penyerapan Anggaran T.A 2022, meliputi : Visi dan Misi, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Alokasi Anggaran.

# Visi, Misi & Tujuan

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa “*Fokus Pemerintah adalah Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju*”. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

## **VISI**

***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***

## **Misi**

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.**
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.**
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.**
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.**
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.**
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.**
- 7. Sebagai bagian dari Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden**
- 8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan**

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah :

***Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden diantaranya Misi Nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Misi Nomor 7 yaitu Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara. Terakhir Misi Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga Misi Presiden tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 7 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan



# Tata Nilai dan Sasaran Strategis

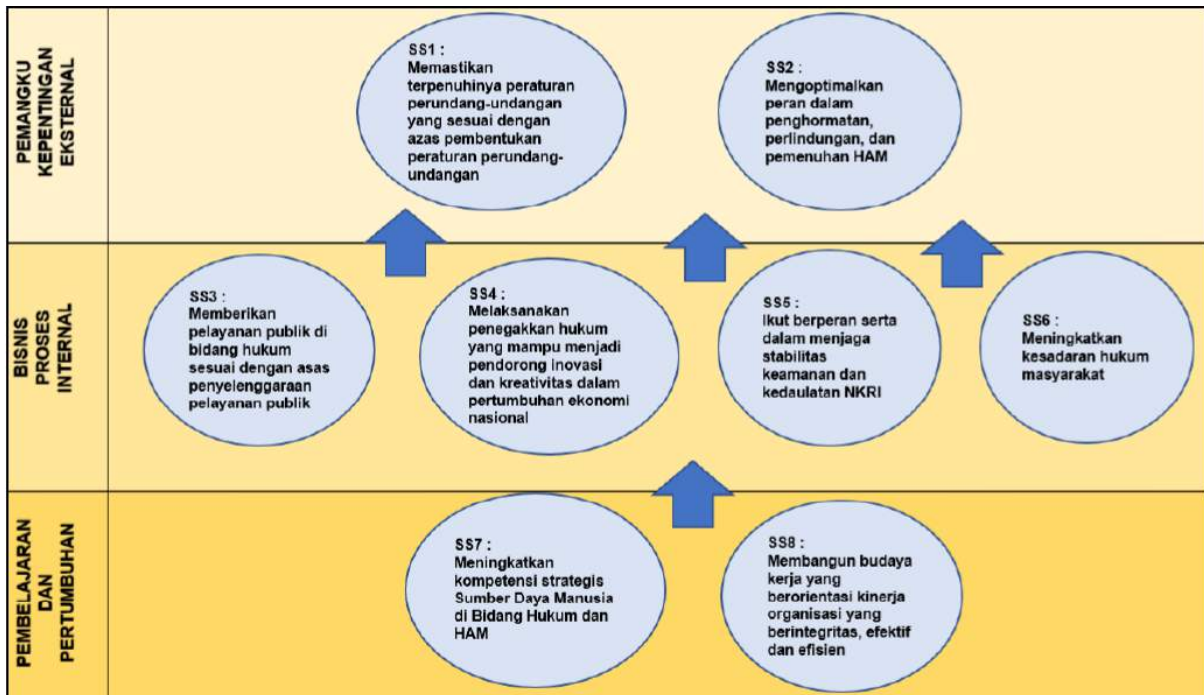
Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tata nilai ini mendukung saat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kami “**PASTI**” yang merupakan akronim dari **P**rofesional, **A**kuntabel, **S**inergi, **T**ransparan, dan **I**novatif. Tata nilai Kami “**Pasti**” merupakan landasan bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan berkarakter Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), terdapat 8 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024). Berikut Landasan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Misi Presiden, dan Sasaran RPJMN 2020-2024 :

**LANDASAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
TAHUN 2020-2024**

<b>MISI PRESIDEN</b>	<b>SASARAN RPJMN</b>	<b>MISI KEMENKUMHAM</b>	<b>SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM</b>
<b>Nomor 6 :</b> Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Terwujudnya regulasi yang berkualitas	1. Membentuk peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	<b>SS1 :</b> Memastikan terpenuhinya Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
	Terseleenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel	2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas	<b>SS3 :</b> Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
	Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal	3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	<b>SS4 :</b> Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
<b>Nomor 7 :</b> Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	<b>SS2 :</b> Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
		5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	<b>SS6 :</b> Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakatan	<b>SS5 :</b> Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
<b>Nomer 8 :</b> Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	<b>SS 7 :</b> Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
			<b>SS8 :</b> Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

**SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
BERDASARKAN PETA STRATEGI LEVEL ORGANISASI**



Berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tangerang untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tangerang berupaya mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

1. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Keperibadian dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi..
2. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban.
3. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Rehabilitasi Narkotika.
4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

## Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi indikator kinerja yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase tahanan/narapidana/Anak mendapat layanan kesehatan (Preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) mendapat layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalah guna/ korban penyalahgunaan narkoba	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Keperibadian,	1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat	65%

	Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	memuaskan pada instrument penilaian keperibadian	
		2. Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	98%
		3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidika	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase Narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikat	28%
		7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase Gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan /narapidana pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

## Perogram dan Anggaran

Disamping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap optimalisasi penyerapan anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pagu anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

### **PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG**

<b>Kode</b>	<b>Program Kegiatan Lapas Kelas IIA Tangerang</b>	<b>Anggaran</b>
<b>013.05.BF</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 3.309.581.000</b>
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp. 3.235.516.000
BHB	Operasi Bidang keamanan	Rp. 74.065.000
<b>013.05.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 5.990.011.000</b>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 5.922.511.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 43.200.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 24.300.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 9.299.592.000</b>

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Informasi tentang pengukuran dan analisis terkait capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dan penyerapan anggaran dalam mendukung tercapainya sasaran Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tangerang

## Capaian Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran kinerja (*performance*) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dan Realisasi anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Hasil pengukuran kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang periode Tahun 2022, diperoleh data capaian kinerja sebagai berikut :



**REALISASI INDIKATOR KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA TANGERANG TAHUN 2022**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5=4/3
<b>Lapas Kelas IIA Tangerang</b>				<b>106,75%</b>
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana sesuai dengan standar	75%	76%	101%
	Persentase tahanan/narapidana/Anak mendapat layanan kesehatan (Preventif) secara berkualitas	93%	100%	107%
	Persentase Tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%	104%
	Persentase tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	120%
	Persentase tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) mendapat layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	120%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	100%	100%

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Keperibadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian keperibadian	65%	67%	103%
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	98%	100%	102%
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	83%	103%
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidika	80%	100%	100%
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	100%	100%
	Persentase Narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikat	28%	28%	100%
	Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	120%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	80%	100%	120%
	Persentase Gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	120%
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan /narapidana pelaku gangguan kamtib	80%	100%	120%
	Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	120%

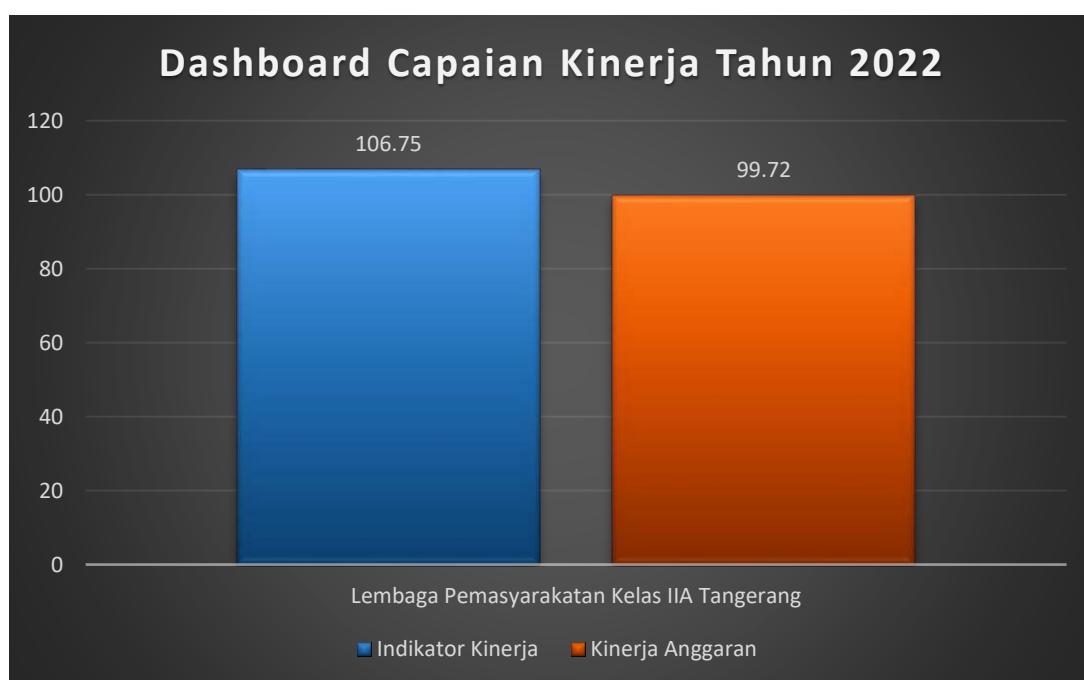
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1	1	100 %
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1	1	100 %
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1	1	100 %
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1	1	100 %
	Jumlah Layanan Perkantoran	1	1	100 %

**REALISASI KINERJA ANGGARAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA TANGERANG TAHUN 2022**

Kode	Kegiatan Program Lapas Kelas IIA Tangerang	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian (%)
<b>013.05.BF</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>3.309.581.000</b>	<b>3.308.665.000</b>	<b>99,97%</b>
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.235.516.000	3.234.625.000	99,97%
BHB	Operasi Bidang keamanan	74.065.000	74.040.000	99,97%
<b>013.05.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>5.990.011.000</b>	<b>5.965.210.884</b>	<b>99,59%</b>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.922.511.000	5.898.360.884	99,59%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	43.200.000	43.200.000	100%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24.300.000	23.650.000	97,33%
<b>Jumlah</b>		<b>9.299.592.000</b>	<b>9.273.875.884</b>	<b>99,72%</b>

**PERFORMANCE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
TANGERANG TAHUN 2022**

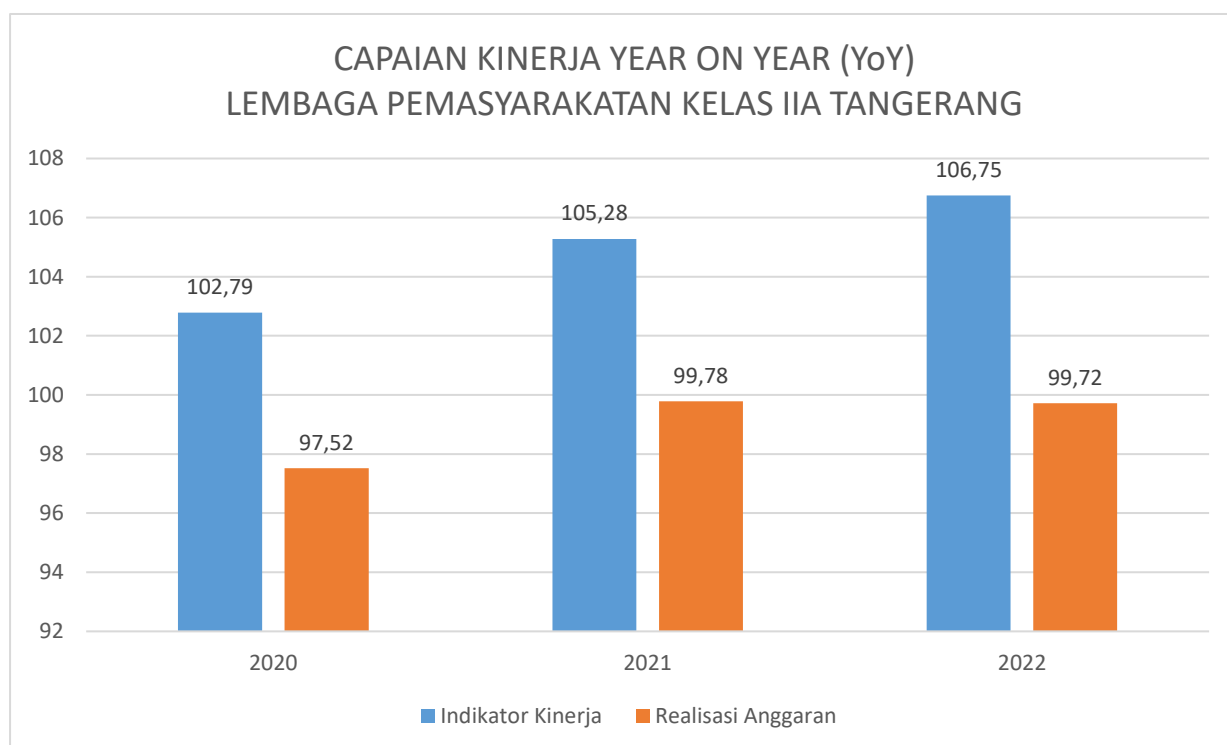
NO	DIPA/ Program	Indikator Kinerja	Kinerja Anggaran	Performance	Efisiensi Sumber Daya
1	2	3	4	$5 = (3+4)/2$	$6 = 3-4$
1	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tangerang	106,75%	99,72%	103,23%	7,02%



## CAPAIAN KINERJA YEAR ON YEAR (YoY)

### LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG

DIPA/ Program	2020		2021		2022	
	Indikator Kinerja	Kinerja Anggaran	Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang	102,79%	97,52%	105,28%	99,78%	106,75%	99,72%



Pada tabel capaian indikator kinerja tahun 2022, diketahui terdapat capaian sebesar 106,75%\* dengan catatan bahwa capaian tersebut menerapkan *konversi 120* yaitu persentase capaian maksimal yang ditetapkan sebesar 120%. Hal ini bertujuan agar hasil capaian kinerja *relevant* dengan outcome yang ingin dicapai berdasarkan konsep SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely*). Berdasarkan infografis capaian kinerja yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang untuk periode tahun 2022 tercapai sangat baik dengan capaian indikator kinerja sebesar 106,75% dan capaian realisasi anggaran sebesar 99,72% sehingga diketahui *performance*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang berdasarkan hasil rata-rata capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar 103,23%. Berdasarkan data capaian kinerja *year on year* (YoY), capaian Indikator Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,47% dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 105,28%. Sedangkan pada sisi Kinerja Anggaran, realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang mengalami penurunan sebesar -0,06% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 99,78%.

**KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG**

No	Satuan Kerja	Nilai IKPA (Bobot 60%)	Nilai SMART (Bobot 40%)	Capaian Kinerja Anggaran
1	2	3	4	5=(3x60%)+(4x40%)
1	Lapas Kelas IIA Tangerang	99,32	99,85	99,53

Kemudian dari data kinerja anggaran yang telah disajikan, diketahui bahwa nilai IKPA Lapas Kelas IIA Tangerang pada tahun 2022 mencapai 99,32 dengan nilai SMART mencapai 99,85. Hasil capaian tersebut telah melebihi dari target yang ditetapkan Kementerian yaitu Nilai IKPA dan SMART sebesar 95. Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat diukur capaian Kinerja Anggaran Lapas Kelas IIA Tangerang yang dihitung dari jumlah nilai IKPA dengan bobot sebesar 60% dan nilai SMART dengan bobot sebesar 40%. Hasil capaian kinerja anggaran Lapas Kelas IIA Tangerang pada tahun 2022 dari penilaian bobot IKPA dan SMART telah mencapai 99,53.

Berdasarkan keseluruhan data yang telah disajikan bahwa capaian kinerja Lapas Kelas IIA Tangerang pada tahun 2022 telah tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIA Tangerang Tahun 2022. Keberhasilan capaian kinerja Lapas Kelas IIA Tangerang pada tahun 2022 ini juga di buktikan dengan prestasi-prestasi yang telah diraih diantaranya :

1. Piagam Penghargaan Sebagai Terbaik 2 dalam Pengelolaan Arsip Tahun 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum HAM Banten



2. Piagam Penghargaan Sebagai Terbaik 3 dalam Pelaksanaan Kinerja Anggaran Tahun 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum HAM Banten



Analisis Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

### 1. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Pada Tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang mengemban 4 Sasaran Kegiatan dengan 24 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui persentase hasil capaian indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang Tahun 2022 sebesar 106,75% dimana terdapat 19 indikator kinerja yang berhasil bahkan melebihi target yang ditetapkan dan 5 indikator kinerja yang dicapainya 100% karena indikator tersebut tidak ada di Lapas kelas IIA Tangerang. Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diantaranya :

- a. Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang Tahun 2022 sebanyak 217 Narapidana atau sebesar 83% dari jumlah yang diusulkan sebanyak 260 Narapidana dengan target sebesar 80% sehingga capaian kinerja tercapai 103%.

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

Informasi tentang kesimpulan Laporan Kinerja Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang dan rencana tindak lanjut.



# Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Banten di tingkat Satker. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis yang ditargetkan Tahun 2022 pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang terdapat 4 sasaran strategis dengan indikator kinerja berjumlah 24 indikator kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk mendukung capaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan 2 program pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang dengan pagu anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 9.998.753.000 dan melakukan Revisi pergeseran Pagu antar satker sehingga pagu akhir menjadi Rp.9.299.592.000.
2. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada periode tahun 2022, seluruh sasaran strategis dengan jumlah 4 sasaran strategis telah mencapai 106,75% dari target. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang pada tahun 2022 mencapai 106,75% dari target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022.
3. Untuk realisasi anggaran dari 2 program pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang, penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2022 mencapai 99,72% atau sejumlah Rp 9.273.875.884,-.
4. Berdasarkan hasil pengukuran capaian dari indikator kinerja dan realisasi anggaran maka dapat diketahui *performance* Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang pada tahun 2022 adalah 103,23%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tahun 2022 kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang secara keseluruhan sudah baik.

# Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, perlu direncanakan tindak lanjut terhadap capaian pada tahun 2022 sehingga pada periode tahun 2023 mendatang kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang yang mengacu kepada sasaran strategis dan realisasi anggaran dapat tercapai maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, diantaranya sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan pengawasan terstruktur terhadap kegiatan yang masih belum terlaksana atau target kinerja yang belum tercapai sebagai proses pengendalian dan percepatan pelaksanaan kinerja di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang.
2. Menyusun rencana kerja dan rencana penarikan kas secara detail perbulan pada masing-masing DIPA/Program di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang sebagai langkah pengendalian dan percepatan pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk mendukung realisasi kegiatan dan memaksimalkan sasaran yang menjadi target kinerja pada tahun 2023.
4. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak –pihak terkait baik dari Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintahan serta Masyarakat untuk memaksimalkan capaian sasaran yang menjadi target kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang.
5. Diperlukan publikasi yang aktual dan berkelanjutan terkait seluruh pelayanan yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang, agar diketahui oleh masyarakat luas dan memudahkan masyarakat/publik yang membutuhkan layanan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan target sasaran yang berhubungan dengan *service delivery*.

Demikian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yekti Apriyanti

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tejo Harwanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 07 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto  
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
IIA Tangerang

Yekti Apriyanti  
NIP. 197704281999022001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekankan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%

3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 4.260.497.000,-</b>
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 4.260.497.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 5.738.256.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 5.738.256.000,-

Serang, 07 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Banten



Tejo Harwanto  
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Masyarakat Kelas  
IIA Tangerang



Yekti Apriyanti  
NIP. 197704281999022001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yekti Apriyanti

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 07 Januari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
IIA Tangerang

Yekti Apriyanti  
NIP. 197704281999022001